PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MENGELOLA DESTINASI WISATA LINGGAI PARK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT

(Studi Kasus: Wisata Linggai Park, Nagari Duo Koto)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Siti Chairani Alsyifah

3222131

Dosen Pembimbing:

Cahya Agung Mulyana, ST. M. PPar

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Siti Chairani Alsyifah dengan NIM 3222131 yang berjudul **"Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Wisata Linggai Park Nagari Duo Koto)"**. Telah memenuhi syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dạn Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya**.**

Bukittinggi, 6 Juli 2026

Pembimbing

CahyaAgungMulyana,ST.M.PPar

NIP. 198708012019031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Siti Chairani Alsyifah
NIM	: 3222131
Tempat/ Tanggal lahir	: Cicawan, 26 Juni 2002
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Wisata Linggai Park Nagari Duo Koto).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/ Skripsi penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di copot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 6 Juli 2026

Saya yang menyatakan

Siti Chairani Alsyifah

NIM : 3222131

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Wisata Linggai Park Nagari Duo Koto)"**. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW serta sahabat serta pengikut-Nya yang senantiasa tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Skripsi ini di susun dalam rangka menyelesaikan Studi S1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada Ayahanda **ADE** dan Ibunda tercinta **MERRY** yang telah mencurahkan kasih sayangnya, yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan, menasehati, dan mendo'akan saya sejak kecil hingga detik ini, serta mengharapkan keberhasilan dan kesuksesan saya. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu dengan keberkahan dan kebahagiaan yang tak terputus. Semua ini penulis persembahkan kepada mereka berdua, semoga diridhoi oleh Allah SWT didunia dan akhirat kelak. *Aamin aamin yaa rabbal alamin.*

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag.M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut dan menimba ilmu.
2. Bapak **Dr.H. Aidil Alfin, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Ibu **Rika Widianita, SE., ME** selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, sekaligus sebagai salah satu mentor bagi penulis di kampus.
4. Bapak **Cahya Agung Mulyana, ST.M.PPar** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Septria Susanti,M,E.** selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Bapak **Muhammad Zulkarnain,S.P.,M.E** selaku dosen pembimbing tahfiz dan sebagai mentor bagi penulis di kampus.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak ibu pemerintahan Nagari Duo Koto yang telah memberikan data dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.

10. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan serta telah menjadi teman baik bagi penulis.
11. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan do'a baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan- Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaian. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Bukittinggi, 6 Juli 2026
Penulis

Siti Chairani Alsyifah
Nim 3222131

ABSTRAK

Skripsi ini di tulis oleh Siti Chairani Alsyifah dengan NIM 3222131 yang berjudul **" Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Wisata Linggai Park, Nagari Duo Koto) ".** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah dalam mengelola destinasi wisata, khususnya wisata Linggai Park, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui devisa, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan masyarakat sekitar destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Nagari dalam mengelola destinasi wisata Linggai Park untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat serta masih ditemukannya berbagai kendala dalam pengelolaan destinasi wisata yang menyebabkan manfaat ekonomi belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat sekitar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah nagari, pengelola, pelaku usaha dan masyarakat sekitar. serta studi dokumentasi terkait kebijakan dan regulasi pemerintah nagari dalam pengelolaan wisata. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 maret 2026 dengan beberapa informan, termasuk Ibu Rahina, Bapak Rajab, Ibu Meli (pedagang), dan Ibu Sabinar, Ibu Samsinar, (pembeli).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengelolaan Wisata Linggai Park. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan tata kelola kawasan wisata melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengaturan kawasan, serta kebijakan retribusi wisata. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan UMKM, promosi wisata, dan pemeliharaan fasilitas pendukung. Sebagai dinamisator, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat melalui pendampingan Pokdarwis, penyelenggaraan berbagai kegiatan wisata, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi. Peran tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui berkembangnya usaha kuliner, perdagangan, jasa wisata, dan penyediaan lapangan kerja. Namun demikian, pengelolaan wisata masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya bantuan permodalan, promosi yang belum optimal, serta masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Nagari dalam mengelola destinasi wisata Linggai Park telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan regulasi, perluasan akses permodalan, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta agar pengelolaan wisata dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Nagari, Regulator, Fasilitator, Dinamisator, Pengelolaan Destinasi Wisata, Linggai Park, Pendapatan Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui devisa, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan masyarakat sekitar destinasi wisata. Dalam konteks pembangunan daerah, pariwisata berperan sebagai dinamisator yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal. Dengan demikian, pengelolaan sektor pariwisata yang baik akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang tinggi.[1]

Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah, memegang peranan penting dalam mengembangkan dan mengelola objek wisata agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sarana dan prasarana wisata, promosi, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak, baik swasta maupun komunitas masyarakat.[2] Pendekatan strategis yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan akan menciptakan sinergi antara

---

[1] Cooper, C. et al., Tourism: *Principles and Practice*, (Harlow: Pearson Education, 2008), hlm. 69.

[2] Bryson, J. M., *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations,* (San Francisco: Jossey-Bass, 2018), hlm. 31.

pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan potensi wisata yang ada.

Salah satu destinasi wisata yang memiliki daya tarik tinggi dan sedang berkembang di Sumatera Barat adalah Wisata Linggai Park, yang terletak di Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Lokasi wisata ini berada di tepi Danau Maninjau, sebuah danau vulkanik yang terkenal dengan keindahan alamnya. Linggai Park menjadi salah satu destinasi unggulan Kabupaten Agam yang menawarkan pemandangan alam menakjubkan dengan panorama danau yang luas, pepohonan rindang, serta udara yang sejuk. Destinasi wisata ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti taman, spot foto, area bermain anak, serta tempat makan yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Perkembangan Linggai Park tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Kabupaten Agam dalam memfasilitasi pengembangan destinasi tersebut. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan infrastruktur, promosi wisata melalui media sosial dan event pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pelatihan usaha mikro dan pengelolaan homestay. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan sekaligus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekitar.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan d alam pengelolaan destinasi wisata Linggai Park. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya promosi yang berkelanjutan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan wisata. Selain itu, belum optimalnya kolaborasi antara

pemerintah, swasta, dan masyarakat menyebabkan pengelolaan destinasi wisata ini belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat sekitar.

Kehadiran Linggai Park sejatinya telah membawa perubahan positif bagi masyarakat Nagari Duo Koto dan sekitarnya. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan kini mulai beralih dan mengembangkan usaha di bidang pariwisata, seperti membuka warung makan, penyewaan perahu, serta jasa pemandu wisata. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola ekonomi masyarakat dari sektor primer menuju sektor jasa yang lebih produktif. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Linggai Park, terjadi peningkatan sirkulasi ekonomi di tingkat lokal yang berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat.

Peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata seperti Linggai Park dapat dilihat melalui fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Melalui fungsi-fungsi ini, pemerintah diharapkan mampu merancang strategi yang komprehensif dalam memajukan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Peran yang diterapkan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian alam.[3]

Dalam proses pengembangan destinasi wisata, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai pengarah, fasilitator, dan regulator. Pemerintah daerah

[3] Yoeti, Oka A., *Manajemen Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 55.

memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan, penyediaan fasilitas umum, peningkatan infrastruktur, promosi wisata, serta pengawasan terhadap kegiatan wisata yang ada di daerahnya. Tanpa adanya peran pemerintah yang aktif dan berkelanjutan, pengembangan pariwisata sering kali tidak terarah dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pariwisata diharapkan mampu melakukan perencanaan jangka panjang dalam pengembangan Linggai Park agar menjadi destinasi wisata unggulan[5].

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada konsep peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor pariwisata. Menurut Lincolin Arsyad, pembangunan ekonomi daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi lokal (local economic driver) apabila dikelola secara optimal.

Selain itu, teori peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur, menetapkan kebijakan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan destinasi wisata seperti Linggai Park tidak hanya bergantung pada potensi alam, tetapi juga pada efektivitas peran pemerintah dalam mengelolanya.

Secara filosofis, pengembangan pariwisata dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi harus mengarah pada tercapainya kesejahteraan (falah),

yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mulk ayat 15 yang menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menjelajahi bumi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara bijaksana. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan wisata seperti Linggai Park bukan hanya bertujuan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang membawa manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian, landasan filosofis penelitian ini menekankan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan wisata harus berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.

Secara sosiologis, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pola kehidupan masyarakat di sekitar Linggai Park. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan mulai beralih ke sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan baru. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh perkembangan sektor wisata.

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial merupakan perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat yang mempengaruhi pola kehidupan dan interaksi sosial. Dalam konteks ini, berkembangnya Linggai Park telah mendorong munculnya berbagai aktivitas ekonomi baru seperti usaha kuliner, jasa wisata, dan perdagangan.

Namun demikian, perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan sosial seperti kurangnya kesiapan masyarakat, rendahnya kesadaran lingkungan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Oleh karena

itu, diperlukan peran pemerintah yang kuat dalam membina dan memberdayakan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan memperoleh manfaat ekonomi secara maksimal.

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dalam mengelola Linggai Park mencerminkan sejauh mana kebijakan publik mampu diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan berbasis partisipasi masyarakat menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan. Melalui partisipasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung, seperti peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya sektor usaha kecil dan menengah di sekitar kawasan wisata.

Secara umum, pengembangan pariwisata memiliki korelasi erat dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2024, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 4,01-4,5 % terhadap PDB nasional, dan menyerap jutaan tenaga kerja di berbagai daerah.[4] Angka ini menunjukkan betapa strategisnya peran sektor pariwisata dalam memperkuat ekonomi nasional maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu merancang kebijakan pengelolaan wisata yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Di Kabupaten Agam sendiri, pengembangan pariwisata menjadi salah satu

[4] Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, *Laporan Data Kunjungan Wisata dan Pendapatan Masyarakat* Tahun 2024, hlm. 12.

fokus utama pemerintah daerah. Berbagai destinasi wisata alam, budaya, dan religi dikembangkan untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah daerah juga berupaya menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam mendukung visi pembangunan daerah, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Agam yang Madani, Berbudaya, dan Sejahtera". Dalam kerangka ini, Linggai Park menjadi salah satu contoh nyata upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi alam untuk pembangunan ekonomi berbasis pariwisata.

Namun, meskipun potensi wisata Linggai Park sangat besar, pengelolaannya masih memerlukan kebijakan yang lebih terarah dan profesional agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam banyak kasus, kegagalan dalam pengelolaan wisata seringkali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya dukungan anggaran, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Oleh sebab itu, penelitian mengenai peran pemerintah dalam mengelola objek wisata Linggai Park menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar.

Selain faktor ekonomi, pengelolaan pariwisata juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang perlu diperhatikan. Pariwisata yang berkembang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat lokal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta degradasi nilai-nilai tradisi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam setiap kebijakan pengembangan wisata. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat, tetapi juga memperkuat

rasa memiliki masyarakat terhadap destinasi wisata tersebut.[5]

Dari sisi keagamaan, Islam juga memberikan pandangan positif terhadap aktivitas wisata selama dilakukan dengan tujuan yang baik dan tetap dalam koridor nilai-nilai syariah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mulk ayat 15:

لَيْهِ وَاِ ۗزِّقِهٖ مِنْ وَكُلُوْا كِبِهَا مَنَا فِيْ مْشُوْا فَا ذَلُوْلًا رْضَ الْاَ لَـكُمُ جَعَلَ الَّذِيْ هُوَ النُّشُوْرُ

"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk 67: Ayat 15)

Ayat ini mengandung pesan bahwa manusia dianjurkan untuk menjelajahi bumi, termasuk melakukan perjalanan atau wisata, dengan tujuan mengambil manfaat dari ciptaan Allah dan mensyukuri nikmat-Nya. Dalam konteks pengembangan wisata seperti Linggai Park, kegiatan pariwisata dapat menjadi sarana untuk mengenali kebesaran Allah melalui keindahan alam, sekaligus menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperoleh rezeki yang halal melalui usaha di bidang pariwisata.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam mengelola objek wisata Linggai Park bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan promosi destinasi, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat agar mampu mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji

[5]Pemerintah Kabupaten Agam, *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)* Kabupaten Agam 2020–2025, hlm. 15.

bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan Linggai Park serta sejauh mana peran tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Dampak positif dari pengembangan objek wisata Linggai Park terhadap masyarakat sekitar dapat dilihat dari meningkatnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Kehadiran wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya mendorong pertumbuhan usaha mikro seperti warung makan, kios cendera mata, penyewaan perahu, serta penginapan sederhana yang dikelola oleh warga lokal. Aktivitas ekonomi ini tidak hanya memberikan tambahan pendapatan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda yang sebelumnya banyak bergantung pada pekerjaan di luar daerah.

Fenomena ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi daerah yang dikemukakan oleh Arsyad, bahwa sektor pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi lokal *(local economic driver)* apabila dikelola dengan memperhatikan potensi dan karakteristik wilayah.[6] Artinya, keberhasilan pengembangan Linggai Park bukan hanya diukur dari jumlah wisatawan yang datang, melainkan dari sejauh mana masyarakat setempat memperoleh manfaat ekonomi nyata dari keberadaan destinasi wisata tersebut.

Selain peningkatan pendapatan, muncul pula efek sosial yang positif berupa penguatan kohesi sosial dan semangat gotong royong. Masyarakat mulai menyadari bahwa menjaga kebersihan dan keindahan Linggai Park bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari kepedulian bersama.

---

[6] Arsyad, Lincolin*, Ekonomi Pembangunan Daerah,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 102.

Namun, di sisi lain, pengembangan wisata juga membawa konsekuensi yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah komersialisasi budaya dan perubahan sosial yang bisa terjadi ketika arus wisatawan meningkat. Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang mengatur agar aktivitas wisata tetap berlandaskan nilai-nilai lokal Minangkabau seperti adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.[7] Prinsip ini penting agar pariwisata tidak merusak tatanan budaya dan moral masyarakat setempat, tetapi justru memperkuat identitas budaya Minangkabau di mata wisatawan.

Selain tantangan sosial dan lingkungan, terdapat pula tantangan struktural yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola sektor pariwisata. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran daerah. Sebagaimana diketahui, anggaran pengembangan pariwisata di tingkat kabupaten masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor lain seperti infrastruktur atau pendidikan.[8]Akibatnya, banyak rencana pengembangan wisata yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kabupaten Agam perlu memperkuat kerja sama dengan pihak swasta dan investor melalui skema public-private partnership (PPP) agar pembangunan fasilitas wisata dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa membebani APBD.

Kendala lainnya adalah koordinasi antarinstansi yang belum berjalan efektif. Pengelolaan Linggai Park melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Nagari, hingga pelaku usaha

[7] Navis, A.A., *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti, 1984), hlm. 64.

[8] Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, *Rencana Kerja Tahun 2023*, hlm. 9.

lokal. Kurangnya koordinasi seringkali menyebabkan tumpang tindih kebijakan atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pemerintah perlu membentuk lembaga pengelola terpadu atau management board yang memiliki kewenangan jelas dalam mengatur dan memantau seluruh aktivitas di kawasan wisata.[9]

Selain aspek ekonomi dan promosi, keberhasilan pengelolaan Linggai Park juga bergantung pada aspek tata kelola (*governance*). Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan fondasi bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan.[10] Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, mengelola dana dengan transparan, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan cepat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan pariwisata seperti Linggai Park juga sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan), yaitu upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan (mafsadah). Islam mendorong umatnya untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan melalui cara-cara yang halal dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

اللّٰهَ ذْكُرُوا وَا اللّٰهِ فَضْلِ مِنْ بْتَغُوْا وَا رْضِ الْاَ فِى نْتَشِرُوْا فَا الصَّلٰوةُ قُضِيَتِ ذَا فَاِ

[9] Sutisna, *Manajemen Pariwisata Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 57.

[10] UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*, (New York: UNDP, 1997), hlm. 5.

تُفْلِحُوْنَ لَّعَلَّكُمْ كَثِيْرًا

"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah 62: Ayat 10)

Ayat ini memberikan pesan bahwa aktivitas ekonomi termasuk usaha pariwisata adalah bagian dari ikhtiar manusia untuk mencari rezeki dan menebar manfaat. Dengan demikian, pengembangan Linggai Park yang memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan yang diridhai Allah SWT.

Pengembangan pariwisata yang baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pendapatan. Ketika jumlah wisatawan meningkat, maka permintaan akan barang dan jasa di kawasan wisata juga meningkat, sehingga masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalankan usaha mereka. Namun, tanpa peran pemerintah yang jelas, manfaat ini tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Agam dalam mengelola Linggai Park dan apakah pengelolaan tersebut memberikan dampak nyata terhadap pendapatan masyarakat di sekitarnya[8].

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara peran pemerintah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam pengelolaan Linggai Park. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Agam untuk melakukan perbaikan dalam pengembangan destinasi wisata. Hasil penelitian juga diharapkan

dapat memberikan motivasi kepada masyarakat sekitar agar lebih aktif dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada di sektor pariwisata.

Selain sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi baru dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat juga dapat memahami bagaimana peluang usaha di kawasan wisata dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Linggai Park diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Pernyataan penulis ini tentunya tidak ada artinya jika tidak dipaparkan dalam bentuk tulisan karena bisa saja ini hanya disebut wacana jika tidak didukung data dan fakta. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul yaitu tentang. “Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus: Wisata Linggai Park, Nagari Duo Koto).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang muncul dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya peran pemerintah dalam mengelola destinasi wisata.
2. Belum maksimalnya kolaborasi pemerintah dengan Masyarakat local dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tidak terlalu luas dan menyimpang dalam pembahasan nantinya, maka penulis membatasi permasalahannya yaitu: Bagaimana Peran Pemerintah Nagari dalam mengelola destinasi wisata linggai park di Nagari Duo Koto, Kabupaten Agam, Kenapa wisata linggai park belum dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat. Dengan adanya batasan masalah ini, penelitian diharapkan dapat lebih fokus dalam menganalisis peran Pemerintah Nagari dalam mengelola destinasi wisata Linggai Park serta mengidentifikasi penyebab belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

1. Bagaimana peran Pemerintah Nagari dalam mengelola destinasi wisata linggai park di Kabupaten Agam?
2. Kenapa wisata linggai park belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan peran pemerintah nagari dalam mengelola destinasi wisata linggai park untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dinagari duo koto Kecamatan Tanj ung Raya, Kabupaten Agam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemahaman mengenai Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengembangkan destinasi wisata. Dengan memahami tantangan dan potensi parawisata pemerintah dapat mengambil langkah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat melalui pengembangan parawisata yang lebih baik. Dengan adanya parawisata yang dikelola dengan baik, pendapatan masyarakat di sekitarnya dapat meningkat, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kemiskinan didaerah tersebut.

G. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahaminya, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih lanjut.

1. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah merupakan suatu upaya pemerintah desa mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi

terciptanya kemakmuran, tidak serta-merta dibebankan oleh masyarakat. Tugas utama pemerintah adalah bagaimana dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat, sehingga memiliki kemampuan berusaha untuk dapat memperoleh penghasilan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya.

Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.[11] Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.[12] Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajibanyang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang.

2. Mengelola

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005). Hal.453.

[12] Florentinus Christian Imanuel, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai kartanegara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan,* 2015. Vol 3,No 2.

Mengelola adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, Mengelola sering kali disamakan dengan manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

3. Destinasi Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara objek wisata merupakan tempat yang menjadi pusat daya tarik dan dapat memberikan kepuasan khususnya pengunjung.

Destinasi wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumberdaya, baik alami maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya. Daerah yang merupakan objek wisata harus memiliki keunikan yang menjadi sasaran utama apabila berkunjung ke daerah wisata tersebut. Keunikan suatu daerah wisata dapat dilihat dari budaya setempat, alam dan flora fauna, kemajuan teknologi dan unsur spiritual.

4. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan penghasilan yang yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan

sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang penting karena pendapatan adalah objek atas aktivitas perusahaan. Pendapatan memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari sisi mana untuk meninjau pengertian pendapatan tersebut.

Menurut FASB (*Financial Accounting Standard Boardi*) yang dikemukakan oleh Harahap, "Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan nilai asset dari suatu entitas atau penyelesian kewajiban dari entitas atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan atau produksi barang. pemberian jasa atas pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan.

5. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan kelompok yang mempunyai ikatan dan kesamaan dalam beberapa hal seperti budaya, sikap, dan perilaku yang membentuk satu kesatuan yang dinamis. Kehidupan dinamis masyarakat tidak dapat dihindari, karena manusia adalah mahkluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup mandiri didalam lingkungannya. Setiap anggota masyarakat memiliki perannya masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Pemerintah Nagari

Peran pemerintah merupakan segala bentuk tindakan, fungsi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, serta mengembangkan kehidupan masyarakat pada berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Pemerintah memiliki fungsi sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator dalam proses pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat, sedangkan sebagai regulator, pemerintah menetapkan aturan dan kebijakan agar suatu kegiatan berjalan tertib dan berkelanjutan. Adapun sebagai dinamisator, pemerintah bertindak sebagai penggerak bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat agar mampu mencapai kesejahteraan yang lebih baik.[13]

Dalam konteks pengelolaan destinasi wisata, peran pemerintah sangat penting karena pariwisata adalah sektor yang melibatkan banyak komponen seperti atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah berperan memastikan seluruh komponen tersebut berjalan optimal melalui pengelolaan yang efektif. Pengelolaan wisata oleh pemerintah meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, pengawasan, hingga evaluasi destinasi wisata agar tetap menarik, aman, dan memberikan manfaat ekonomi. Pemerintah juga memastikan adanya sinergi antara

[13] Ndraha, Taliziduhu. *Kinerja Pemerintahan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

pengelola wisata, masyarakat lokal, dan pelaku usaha untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan.[14]

Dalam konteks Kabupaten Agam, pengembangan kawasan wisata Linggai Park merupakan bagian dari implementasi kebijakan pariwisata daerah yang tertuang dalam rencana induk pengembangan kawasan wisata. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah, implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata Linggai menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan anggaran pembangunan sejak tahun 2017 hingga 2021, pengembangan infrastruktur, serta promosi wisata.

Namun demikian, data sekunder dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi RIPPDA di kawasan Linggai belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kontribusi objek wisata Linggai yang masih belum mencapai 10% dari target kunjungan wisata Kabupaten Agam. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya promosi yang berkelanjutan, serta belum optimalnya kualitas pelayanan wisata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan melalui RIPPDA, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan penguatan peran pemerintah, terutama dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan destinasi, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan demikian, keberadaan RIPPDA tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang harus

[14] Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. (Bandung: Angkasa, 2008).

diimplementasikan secara efektif agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Dalam penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah Nagari dalam pengembangan objek wisata yang terdiri dari beberapa komponen yang dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri 2005 pemerintah Nagari memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah yaitu:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah juga memiliki peran sebagai regulator, yaitu dalam menetapkan kebijakan, aturan, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata. Peran ini mencakup pengaturan perizinan usaha, penataan kawasan wisata, serta perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara tertib, terarah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Secara teori, regulasi diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah membuat norma, standar, dan prosedur yang harus dipatuhi oleh warga maupun lembaga, sehingga aktivitas di berbagai sektor dapat berjalan lebih terarah dan terkontrol. Dengan adanya peran ini, pemerintah menjadi pengarah utama yang memastikan kebijakan publik dapat dijalankan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, peran regulator juga berarti pemerintah berwenang mengawasi pelaksanaan aturan serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar. Pengawasan ini penting agar kebijakan tidak hanya

berhenti pada aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik. Dalam konteks pembangunan, fungsi regulator membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Dengan demikian, pemerintah sebagai regulator dapat dipahami sebagai pihak yang memiliki tugas utama menyusun, mengarahkan, mengawasi, dan menegakkan aturan agar kehidupan bermasyarakat berjalan tertib, aman, dan adil. Peran ini sangat penting karena menjadi dasar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang lebih efektif.

2. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran fasilitator merupakan peran pemerintah daerah sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengolahan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah otonominya serta dapat meliputi pengefisienan, proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

Peran pemerintah sebagai fasilitator ialah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah berfungsi sebagai penggerak utama yang mampu mengoordinasikan dan menyinergikan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan, seperti sektor swasta, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Dalam peran ini, pemerintah tidak hanya menjadi pengendali, tetapi juga sebagai mediator dan katalisator yang menjembatani kepentingan berbagai pihak. Pemerintah mendorong terciptanya kemitraan (partnership) dan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan pariwisata berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.[15]

Peran pemerintah daerah tersebut berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari upaya pemerintah nagari dalam menciptakan kebijakan, fasilitas, dan iklim usaha yang mendukung kegiatan ekonomi rakyat.

Dengan demikian, teori tentang peran pemerintah daerah ini menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari Duo Koto melalui pengembangan potensi lokal yang ada. Selain peran pemerintah sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator, keberhasilan pembangunan pariwisata juga sangat ditentukan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut menjadi landasan dalam mengatur, mengelola, dan

[15] Gayatri, I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 95-101.

mengembangkan potensi wisata agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

B. Pengelolaan Destinasi Wisata

Pengelolaan destinasi wisata merupakan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap seluruh unsur yang ada di suatu kawasan wisata untuk menciptakan daya tarik yang berkelanjutan. Menurut Oka Yoeti, pengelolaan pariwisata adalah usaha yang dilakukan untuk mengatur berbagai komponen wisata agar mampu menarik wisatawan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.[16] Pengelolaan ini mencakup penyediaan atraksi wisata, peningkatan aksesibilit as, penyediaan amenitas, serta penciptaan suasana yang nyaman dan aman bagi wisatawan. Pengelolaan yang baik akan menjadikan suatu destinasi wisata lebih teratur, menarik, dan layak dikunjungi.

Dalam konteks destinasi wisata, ada tiga komponen utama yang harus dikelola, yaitu atraksi (apa yang dapat dilihat dan dinikmati oleh wisatawan), aksesibilitas (kemudahan menuju lokasi wisata), dan amenitas (fasilitas pendukung wisata seperti toilet, tempat makan, lahan parkir, taman, dan sarana rekreasi).[17] Ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Jika atraksi wisata menarik tetapi akses sulit, maka minat wisatawan untuk datang akan berkurang. Begitu juga jika fasilitas tidak memadai, wisatawan tidak akan merasa nyaman untuk berlama-lama di lokasi wisata. Karena itu,

[16] Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. (Bandung: Angkasa, 2008).

[17] Cooper, Chris. *Tourism: Principles and Practice*. (London: Pearson, 2005).

pengelolaan menjadi kunci untuk memastikan semua unsur berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan wisatawan.

Teori pengelolaan destinasi wisata ini sangat relevan dengan penelitian tentang Linggai Park, karena Linggai Park sebagai objek wisata alam membutuhkan pengelolaan yang tepat agar mampu menarik minat wisatawan secara berkelanjutan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan memainkan peran penting dalam memastikan pengelolaan tersebut berjalan baik, misalnya melalui penataan area wisata, pembangunan fasilitas pendukung, pengembangan atraksi seperti wahana air, gazebo, lokasi swafoto, hingga kegiatan budaya atau event yang dapat menarik wisatawan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan keberlangsungan lingkungan melalui pengelolaan kebersihan dan keamanan kawasan wisata.

Dengan pengelolaan yang baik, destinasi wisata seperti Linggai Park dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan kunjungan ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, karena wisatawan akan membelanjakan uang mereka pada usaha masyarakat seperti kuliner lokal, kerajinan, parkir, dan jasa wisata lainnya. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata yang tepat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat.

C. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan sosial ekonomi suatu daerah. Peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik dan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan yang

dilakukan pemerintah.

Menurut Sukirno, pendapatan masyarakat adalah jumlah seluruh penerimaan yang diperoleh masyarakat dari hasil kerja atau usaha dalam jangka waktu tertentu, baik berupa upah, gaji, sewa, bunga, maupun keuntungan.[18] Peningkatan pendapatan masyarakat dapat tercapai apabila terjadi peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam perspektif pembangunan daerah, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Menurut Todaro, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan, tetapi juga untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan.[19] Oleh karena itu, peningkatan pendapatan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap strategi pembangunan daerah.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat antara lain:

1) Tingkat pendidikan dan keterampilan, yang menentukan kemampuan seseorang dalam memperoleh pekerjaan atau menciptakan usaha

[18] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54.

[19] Michael P. Todaro, *Economic Development* (New York: Addison Wesley, 2000), hlm. 32.

produktif.

2) Ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan.
3) Kebijakan pemerintah, seperti dukungan modal, infrastruktur, dan pelatihan kewirausahaan.
4) Pemanfaatan potensi daerah, termasuk sektor pariwisata, yang dapat menciptakan multiplier effect ekonomi.[20]

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat karena mampu menciptakan banyak peluang ekonomi. Menurut Yoeti, pariwisata memiliki multiplier effect yang tinggi, yaitu setiap kegiatan wisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor pendukung seperti transportasi, perdagangan, kuliner, dan jasa akomodasi.[21] Dengan kata lain, semakin berkembang suatu destinasi wisata, maka semakin besar pula potensi peningkatan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

b. Hubungan Antara Pengelolaan Wisata dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pengelolaan destinasi wisata yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut Pitana dan Diarta, ketika pariwisata berkembang dengan baik, masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja,

[20] Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 88.

[21] Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 102.

peningkatan permintaan terhadap produk lokal, dan tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UMKM).[22] Dengan demikian, pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat akan menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks Linggai Park, pemerintah daerah berperan penting dalam mengelola destinasi wisata agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melalui strategi pengembangan wisata yang terencana seperti peningkatan infrastruktur, promosi wisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru dan memperluas sumber pendapatan masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai pedagang kuliner, penyedia jasa parkir, pengelola homestay, pemandu wisata, atau penjual suvenir.

Selain dampak ekonomi langsung, pengelolaan wisata yang baik juga memberikan dampak tidak langsung *(induced effect)*, seperti meningkatnya investasi, pembangunan fasilitas publik, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi di sektor lain. Semua ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara menyeluruh.

c. Peran Pemerintah dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Pariwisata

Menurut Rasyid, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat meliputi tiga hal penting, yaitu pemerintah sebagai fasilitator,

[22] I Gde Pitana dan Putu G. Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 115.

regulator, dan katalisator.[23]

1) Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
2) Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan dan aturan yang mendukung kegiatan ekonomi, termasuk di sektor pariwisata.
3) Sebagai dinamisator, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Dengan menjalankan ketiga peran tersebut, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Pemerintah Nagari Duo Koto misalnya, dapat menerapkan berbagai strategi dalam pengelolaan Linggai Park, seperti:

1) Meningkatkan kualitas infrastruktur wisata (jalan, tempat parkir, penerangan, fasilitas umum).
2) Menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat lokal tentang kewirausahaan dan pelayanan wisata.
3) Membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengorganisasi partisipasi masyarakat.
4) Melakukan promosi wisata berbasis digital agar jumlah wisatawan meningkat.
5) Menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk investasi dan pengembangan fasilitas wisata.

[23] Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2000), hlm. 45.

D. KAJIAN TERDAHULU

Dalam kajian penelitian sebelumnya dapat dijadikan perbandingan dan acuan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian terdahulu yang mengambil tema "Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengelola Objek Wisata Linggai Park Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat" pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti	Perbedaan Peneliti
1	Maria Ines T. Ndepi (2024).	Peran Pemerintah Daerah dalam Mengambangkan Objek Wisata di Danau Tiwu Sora, Desa Tiwu Sora, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende.	Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata Danau Tiwu Sora maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, peran pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata Danau Tiwu Sora di Kabupaten Ende belum dikatakan berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya akses jalan menuju objek wisata yang kurang baik dan masih banyak jalan yang rusak, Pembangunan sarana prasarana yang kurang diperhatikan, seperti tempat parkir yang kurang ditata	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu, Mengkaji peran pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata Linggai Park dengan fokus pada peningkatan pendapatan masyar akat melalui pengelolaa n wisata. Pemerintah lokal melakukan kolaborasi antar sektor dan konsistensi anggaran untuk

			dengan baik. Selain itu pihak dinas pariwisata telah melakukan promosi melalui social media agar Lokasi wisata tersebut banyak dikenal oleh berbagai daerah dan Masyarakat luas, agar dapat meningkatkan potensi para pengunjung di Lokasi wisata tersebut.	pengembangan destinasi wisata, serta mengupayakan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan destinasi.
2	Hasmiati (2021)	Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Di Desa Kayuangin Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).	Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam hal ini displora dalam pengelolaan wisata bendungan untuk meningkatkan Pedapatan Asli Desa (PAD) maka dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan sektor pariwisata di Desa Kayuangin untuk meningkatkan (PAD) oleh pemerintah Desa seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan. Melakukan pembangunan tempat istirahat bagi pengunjung, musholla, sepeda air bebek-bebek, spick boor dan dermaga. Namun tempat	Peran pemerintah daerah dalam mengelola destinasi wisata Linggai Park dengan fokus pada pengembangan kawasan dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar melalui upaya fasilitasi, kolaborasi, dan anggaran pembangunan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, pengatur, dan penggerak

			wisata tersebut jauh dari kota. Di samping itu juga jalanan untuk menuju wisata tersebut masih kurang baik. Hambatan dalam pengelolaan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli desa yaitu insfratuktur/bangunan jalan transportasi, sumber daya manusia pengelola bumdes, pengunjung merupakan warga setempat juga hanya pengunjung masiman, bencana alam, adanya covid-19.	pembangunan wilayah wisata dengan dukungan anggaran serta kerja sama antar sektor dan masyarakat.
3	Jasilatul Khotimah dan Aprilina Pawestri (2022).	Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai.	Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan perannya sebagai regulator dengan membuat RIPPARDA dan beberapa peraturan terkait pariwisata. Peran sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dilaksanakan sekaligus dalam satu program pendampingan dan pelatihan. Bentuk pemberian fasilitas terhadap pengembangan destinasi wisata dilakukan	Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi wisata Linggai Park untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan fasilitas dan kolaborasi antar sektor.

			dengan dua model, yang pertama pemberian sarana dan prasarana secara langsung. Yang kedua adalah dengan pemberian pelatihan kepada pengelola untuk memberikan ilmu tentang bagaimana caranya membuat atau mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.	
4	Fenti Prihatini Tui, dkk. (2023)	Peran pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata di Kawasan pesisir Kabupaten Bone Bolango.	Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) Peran pemerintah sebagai regulator, belum optimal meskipun sudah ada regulasi namun penyelenggaraan pariwisata belum terkelola dengan baik. (2) Peran pemerintah sebagai dinamisator sudah optimal, hal ini ditunjukan dengan adanya program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan rutin setiap tahun sehingga berdampak pada meningkatkan Pelayanan kepada wisatawan yang	Penelitian di Bone Bolango membahas wilayah pesisir secara lebih luas, mencakup berbagai objek wisata di sepanjang kawasan tersebut, sehingga peran pemerintah yang dikaji lebih bersifat makro dan strategis dalam konteks pengembangan sektor pariwisata secara menyeluruh. Sedangkan penelitian saya lebih terbatas pada satu destinasi yaitu Linggai Park yang

			berkunjung di setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango. (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah optimal hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai program diantaranya penyediaan fasilitas pemasaran pariwisata yang berbasis Teknologi Informasi.	berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Fokus penelitian tidak hanya pada peran pemerintah dalam upaya pengelolaan, tetapi juga bagaimana pengelolaan tersebut berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, orientasi penelitian saya bersifat lebih aplikatif dan menekankan hubungan antara intervensi pemerintah dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.
5	Ahkamil Hakim, dkk. (2024).	Peran pemerintah dalam program parawisata	Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam	Fokus penelitian tersebut tidak hanya pada

		berkelanjutan dalam Upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba.	Upaya Mewujudkan Sustainabel Development Goals (SDGs) di Danau Toba yaitu pengembangan secara berkelanjutan memiliki kontribusi pada Sustainable Development Goals (SDGs), yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan atas pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal dengan menganut tiga aspek yaitu economic (prosperity), ecological (planet), dan social & cultural (people).	pengelolaan wisata sebagai objek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, pemberdayaan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan Penelitian saya membahas peran pemerintah dalam mengelola satu destinasi wisata tertentu di tingkat daerah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Konsep yang diangkat lebih bersifat praktis dan berorientasi langsung pada dampak ekonomi lokal.

6	Moch Yusuf Syarifudin, Muhammad Farid Ma'ruf (2022)	Peran pemerintah desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat melalui desa wisata.	Hasil penelitian didasarkan Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program, Peran pemerintah desa sebagai Pembina. Peran Pemerintah Desa Jurug merumuskan kebijakan terkait pengembangan desa wisata sudah baik, namun pada pelaksanaan program dan pembinaan, Pemerintah Desa Jurug masih kurang. Masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya tindak lanjut sosialisasi, kurangnya partisipasi masyarakat, alokasi dana, dan permasalahan terkait limbah kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa Jurug sudah melakukan pembinaan dibidang ekonomi, kepemudaan dan keagamaan.	Studi ini menitikberatkan pada bagaimana pemerintah desa menjadi penggerak utama dalam membangun desa wisata sebagai strategi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Sedangkan penelitian saya tentang peran pemerintah di Linggai Park lebih ditekankan pada pengelolaan destinasi, termasuk penyediaan fasilitas, perbaikan infrastruktur, promosi wisata, pengaturan pedagang dan pelaku ekonomi, serta kerja sama dengan masyarakat dalam bentuk yang lebih terbatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam bagaimana Peran pemerintah dalam mengelola destinasi wisata Linggai Park serta bagaimana pengelolaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

Melalui penelitian ini, peneliti akan berusaha menggali berbagai bentuk peran yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pengembangan sarana wisata, promosi, kerja sama dengan masyarakat, serta upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan agar wisata Linggai Park dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan januari sampai selesai. Penelitian ini berlokasi dinagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi karena objek wisata linggai park letaknya strategis dekat dengan jalan raya dan menyajikan pemandangan danau yang indah serta banyak tempat-tempat untuk berswafoto yang bagus.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Linggai Park.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

a) Pihak pemerintah daerah, terutama dari Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan Linggai Park.
b) Pengelola Linggai Park, yang mengetahui secara langsung proses pengembangan dan kegiatan wisata di kawasan tersebut.
c) Masyarakat sekitar, khususnya pelaku usaha kecil, pedagang, dan penyedia jasa di sekitar Linggai Park yang merasakan langsung dampak ekonomi dari kegiatan wisata.

Dari sumber ini peneliti memperoleh informasi mengenai bentuk pemerintah, bentuk kerja sama dengan masyarakat, serta manfaat ekonomi yang dirasakan oleh warga sekitar destinasi wisata.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data sekunder meliputi:

a) Dokumen dari Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, seperti laporan tahunan, data pengunjung, dan rencana pengembangan pariwisata.
b) Arsip atau berita dari media lokal dan nasional yang membahas perkembangan Linggai Park.

c) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kondisi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

d) Literatur dan tulisan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata daerah serta strategi pemerintah dalam sektor ekonomi masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai peran pemerintah dalam mengelola destinasi wisata Linggai Park serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi di lapangan, yaitu dikawasan linggai park. Peneliti memperhatikan bagaimana pengelolaan wisata dilakukan, fasilitas yang tersedia, partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata, serta aktivitas ekonomi yang muncul di sekitar lokasi.

   Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran nyata tentang bentuk pengelolaan yang diterapkan pemerintah serta perubahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat sekitar.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan Linggai Park.

   Informan dalam penelitian ini meliputi:

a) Pihak Pemerintah Daerah, khususnya dari wali nagari yang mengetahui

peran dan kebijakan pengembangan wisata Linggai Park.

b) Pengelola Linggai Park, yang memahami pelaksanaan kebijakan di lapangan dan berbagai kendala yang dihadapi.
c) Masyarakat Sekitar, seperti pedagang, pelaku usaha kecil, dan warga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari adanya kegiatan wisata.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam untuk memperoleh data yang rinci mengenai peran, langkah, dan hasil dari strategi pengelolaan wisata yang dilakukan pemerintah.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen dan bahan tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

a) Data dan laporan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Agam tentang Linggai Park.
b) Arsip kegiatan dan foto-foto lokasi wisata.
c) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kondisi ekonomi masyarakat sekitar.
d) Artikel atau berita dari media massa yang membahas perkembangan Linggai Park.

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, serta sebagai bahan pembanding agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan terpercaya.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana peran pemerintah dalam mengelola destinasi wisata Linggai Park serta bagaimana pengelolaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan Data

   Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Semua informasi dari berbagai sumber dikumpulkan secara lengkap tanpa ada yang dihilangkan agar hasil analisis mencerminkan keadaan sebenarnya.

2. Reduksi Data

   Tahap ini dilakukan dengan cara menyeleksi dan menyederhanakan data yang telah diperoleh. Data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu strategi pemerintah dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat dipilih dan dikelompokkan sesuai kategori.

3. Penyajian Data

   Data yang sudah diseleksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Penyajian data dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat terlihat hubungan antara strategi pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar Linggai Park.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari seluruh hasil temuan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data yang menggambarkan secara nyata strategi pemerintah dalam mengelola Linggai Park serta bagaimana strategi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Kesimpulan juga menjadi dasar untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi pengembangan destinasi wisata agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Kecamatan Tanjung Raya merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan ini memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di kawasan sekitar Danau Maninjau yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. Danau Maninjau dikenal sebagai danau vulkanik yang dikelilingi perbukitan hijau dan memiliki panorama alam yang indah, sehingga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.[24]

Secara geografis, Kecamatan Tanjung Raya berada pada ketinggian sekitar 400–900 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22°C hingga 28°C. Kondisi alam yang sejuk dan lingkungan yang masih asri menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya sektor pariwisata di wilayah ini. Selain itu, wilayah Tanjung Raya juga memiliki akses jalan yang cukup memadai untuk menjangkau berbagai destinasi wisata, meskipun beberapa ruas jalan menuju kawasan wisata masih memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.[25]

---

[24] Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Kecamatan Tanjung Raya dalam Angka 2025* (Lubuk Basung: BPS, 2025).

[25] Pemerintah Kabupaten Agam, *Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Agam* (Agam, 2024).

Potensi alam yang dimiliki Kecamatan Tanjung Raya memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi lokal.

2. Visi dan Misi Pengembangan Wisata Linggai Park

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Linggai Park, pemerintah daerah Kabupaten Agam menetapkan arah kebijakan pembangunan pariwisata yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah.[26]

Visi:

> "Mewujudkan destinasi wisata Linggai Park sebagai kawasan wisata unggulan berbasis keindahan alam yang berdaya saing dan mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar".

Misi:

a. Mengembangkan potensi wisata alam Linggai Park secara berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.
b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wisata untuk mendukung kenyamanan pengunjung.
c. Memberdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis pariwisata.
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha wisata.

[26] Pemerintah Kabupaten Agam, *RPJMD Kabupaten Agam 2021–2026*.

e. Mendorong promosi dan pemasaran wisata secara lebih luas melalui media digital dan kegiatan pariwisata.

Visi dan misi ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pengelolaan Linggai Park.

3. Sejarah Perkembangan Wisata Linggai Park

Linggai Park merupakan salah satu destinasi wisata yang berkembang di kawasan Kecamatan Tanjung Raya yang berada di sekitar Danau Maninjau. Secara historis, kawasan ini pada awalnya merupakan lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area pertanian dan perkebunan sejak sebelum tahun 2010.

Pada sekitar tahun 2014–2015, masyarakat mulai menyadari bahwa lokasi tersebut memiliki potensi wisata yang cukup besar karena memiliki panorama alam yang langsung menghadap ke Danau Maninjau[2]. Keindahan pemandangan ini kemudian menarik perhatian masyarakat lokal untuk menjadikannya sebagai tempat rekreasi sederhana.

Selanjutnya, pada tahun 2016, mulai muncul inisiatif dari masyarakat bersama pemerintah nagari untuk mengembangkan kawasan tersebut secara lebih terarah. Pada tahap awal, pengembangan masih dilakukan secara sederhana, seperti pembersihan lahan, pembuatan tempat duduk sederhana, serta penataan area agar dapat dikunjungi oleh wisatawan.

Pada tahun 2017–2018, pemerintah daerah Kabupaten Agam mulai memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan Linggai Park. Hal ini ditandai dengan mulai dibangunnya akses jalan menuju lokasi wisata serta

penyediaan fasilitas dasar seperti area parkir dan tempat istirahat. Dukungan pemerintah ini menjadi titik awal berkembangnya Linggai Park sebagai destinasi wisata yang lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Gambar 4.1

Pembangunan wisata linggai park



Sumber: visitbeautifulwestsumatra Tahun 2023.

Memasuki tahun 2019 hingga 2023, perkembangan Linggai Park semakin pesat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung, terutama pada akhir pekan dan hari libur nasional. Selain itu, fasilitas wisata juga semakin berkembang dengan adanya gazebo, spot foto, serta bertambahnya jumlah pelaku usaha masyarakat yang membuka usaha di sekitar lokasi wisata.[27]

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Linggai Park tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, tetapi juga menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi masyarakat lokal. Keberadaan wisata ini telah membuka peluang usaha baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi

[27] Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, Profil Destinasi Wisata Kabupaten Agam (Agam, 2024).

masyarakat di sekitarnya.

Hingga saat ini, Linggai Park terus mengalami pengembangan, baik dari segi fasilitas, pengelolaan, maupun promosi wisata. Pemerintah daerah bersama masyarakat terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata ini agar mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Sumatera Barat.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di kawasan wisata Linggai Park diketahui bahwa pemerintah nagari memiliki peran penting dalam pengelolaan destinasi wisata guna meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini, peran pemerintah dianalisis berdasarkan tiga fungsi utama yaitu sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator. Ketiga peran tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan kawasan wisata, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan yang menyebabkan pengelolaan wisata belum berjalan secara maksimal.

Keberadaan Linggai Park sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Agam memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang mulai membuka usaha kecil seperti rumah makan, tempat penginapan (homestay), penyewaan perahu, hingga usaha oleh-oleh khas danau maninjau untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang berkunjung. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Adapun peran

pemerintah itu diukur dengan peran regulator, peran fasilator, peran dinamisator. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan temuan riset yang terkait dengan tiga peran tersebut.

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan peran pemerintah dalam membuat aturan, kebijakan, dan pengawasan terhadap pengelolaan destinasi wisata agar berjalan dengan tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pengelolaan wisata Linggai Park, Pemerintah Nagari telah melakukan berbagai upaya pengaturan seperti.

a. Undang-Undang No 32 Tahun 2004

Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta masyarakat.

Otonomi daerah, setiap daerah bisa menggali potensi yang bisa dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing

daerah dapat meningkat pesat. Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah: sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lain-lain. Peneliti lebih tertarik dari salah satu sektor tersebut yaitu sektor pariwisata, karena Kabupaten Agam memiliki potensi sektor pariwisata yang besar untuk dikembangkan.

Otonomi daerah bisa membuat Kabupaten Agam lebih bisa mengoptimalkan potensi yang ada tanpa harus menunggu perintah dari pusat jika ingin mengembangkan kawasannya.Karena daerah sendiri yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri.

b. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Regulasi khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan wisata linggai park, dijelaskan oleh Wali Nagari Bapak Jendrial sebagai berikut.

"saat ini kami telah membentuk pengurus kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengelola potensi daya tarik wisata secara mandiri, berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat."[28]

Berdasarkan wawancara tersebut, keterangan Wali Nagari, Bapak Jendrial, pemerintah nagari telah mengeluarkan regulasi khusus berupa usulan pembentukan pengurus Kelompok Sadar

[28] Wawancara dengan Wali Nagari Bapak Jendrial di kantor Wali Nagari pada tanggal 23 April 2026.

Wisata (Pokdarwis) yang bertujuan untuk mengelola potensi daya tarik wisata Linggai Park secara mandiri, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini merupakan langkah regulator strategis untuk membentuk kelembagaan lokal yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan aktivitas pariwisata, sehingga pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas setempat. Melalui posisi pengurus Pokdarwis sebagai pelaksana teknis, regulasi tersebut diharapkan mendorong praktik pengelolaan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Selain itu, keberadaan aturan ini membuka ruang bagi pemerintah nagari untuk memberikan pendampingan, menetapkan standar operasional, dan memfasilitasi akses pembiayaan atau kemitraan sehingga pengelolaan wisata tidak sekadar administratif tetapi juga mampu menghasilkan dampak sosial-budaya dan ekonomi yang terukur bagi warga sekitar.

c. Pengaturan Tata Kelola Wisata

Pengaturan tata kelola kawasan wisata merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pengelola, dan pihak terkait dalam mengatur, mengarahkan, serta

mengawasi seluruh kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata agar berjalan secara teratur, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Tata kelola kawasan wisata bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar tanpa merusak sumber daya yang dimiliki.

Dalam konteks pengelolaan objek wisata, pengaturan tata kelola mencakup beberapa aspek penting. Seperti, pengaturan mengenai pemanfaatan lahan dan fasilitas wisata. Pemerintah atau pengelola menentukan area yang dapat digunakan untuk kegiatan wisata, area parkir, tempat berjualan, fasilitas umum, serta kawasan yang harus dilindungi.

Berdasarkan wawancara dengan ibu miswar, salah satu pelaku usaha dikawasan wisata linggai park mengatakan, *"Menurut saya, pemerintah sudah cukup baik dalam mengatur kawasan wisata ini. Mereka mengatur tempat berjualan agar pedagang tidak berjualan sembarangan dan kawasan wisata terlihat lebih rapi. Selain itu, pemerintah juga sering mengingatkan kami untuk menjaga kebersihan lingkungan wisata."*[29]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pemerintah telah berupaya mengatur tata kelola wisata bertujuan untuk menjaga

[29] Wawancara dengan Pelaku usaha di Linggai Park yaitu Ibu Miswar pada tanggal 25 April 2026

keindahan dan kelestarian lingkungan wisata serta mencegah terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai.

Dengan demikian, peran pemerintah sebagai regulator di Linggai Park sudah berjalan pada tahap dasar pengaturan dan pengawasan, tetapi masih perlu diperkuat melalui penyusunan kebijakan yang lebih jelas, terarah, dan berpihak pada pengembangan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata.

d. Pengaturan Retribusi Tiket Masuk

Tarif masuk objek wisata linggai park ditetapkan oleh pemerintah kabupaten agam melalui kebijakan retribusi daerah. Kebijakan ini dikelola secara resmi oleh dinas terkait, seperti dinas parawisata kabupaten agam, dan pembayaran diberlakukan menggunakan sistem retribusi tunai maupun non-tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hengki salah satu perangkat nagari dijelaskan bahwa:

"Pemerintah Kabupaten Agam sudah menetapkan tarif masuk wisata sebesar Rp3.000 untuk dewasa, Rp2.000 untuk anak-anak dan tarif parkir sebesar Rp3.000 untuk kendaraan roda 4, Rp2.000 untuk kendaraan roda 2."[30]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Tarif masuk objek wisata linggai park ditetapkan oleh pemerintah

[30] Wawancara dengan Perangkat Nagari di kantor Wali Nagari yaitu Bapak Hengki pada tanggal 23 April 2026

kabupaten agam melalui kebijakan retribusi daerah. Kebijakan ini dikelola secara resmi oleh dinas terkait, seperti dinas parawisata kabupaten agam, dan pembayaran diberlakukan menggunakan sistem retribusi tunai maupun non-tunai.

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan peran pemerintah dalam menyusun aturan, kebijakan, serta mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang tertib, transparan, dan berkelanjutan. Menurut teori Sondang P. Siagian, pemerintah sebagai regulator bertugas menetapkan berbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan suatu sektor, termasuk sektor pariwisata. Dalam konteks Wisata Linggai Park, peran tersebut diwujudkan melalui penetapan tarif retribusi masuk dan parkir yang menjadi dasar dalam pengelolaan pendapatan kawasan wisata.

Penetapan tarif retribusi oleh Pemerintah Kabupaten Agam bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan objek wisata. Dengan adanya tarif yang telah ditentukan secara resmi, pengelola wisata memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan pemungutan biaya masuk kepada pengunjung. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencegah terjadinya pungutan liar atau penetapan tarif yang tidak sesuai sehingga dapat menjaga kepercayaan wisatawan terhadap pengelolaan objek wisata.

Retribusi yang diperoleh dari tiket masuk dan parkir tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pemeliharaan fasilitas wisata, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan akses jalan, penyediaan fasilitas kebersihan, keamanan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Dengan fasilitas yang semakin baik, tingkat kenyamanan pengunjung akan meningkat sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Linggai Park.

Selain itu, kebijakan retribusi yang dikelola secara resmi juga memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan wisata. Pengelolaan yang transparan memungkinkan pemerintah dan pengelola wisata untuk merencanakan program pengembangan yang lebih baik. Ketika fasilitas wisata terus ditingkatkan melalui dana retribusi yang terkumpul, daya tarik Linggai Park akan semakin meningkat sehingga jumlah kunjungan wisatawan berpotensi bertambah dari tahun ke tahun. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat sekitar.

2. Peran Pemerintah Nagari sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan peran pemerintah dalam penyediaan sarana, prasarana dan bantuan yang mendukung

pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dikawasan wisata serta membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam pengelolaan wisata Linggai Park, pemerintah daerah telah menyediakan beberapa fasilitas untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat.

a) Pelatihan UMKM Lokal

Pemerintah Nagari Duo Koto menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas UMKM di Aula Pasar Ahad Nagari Duo Koto, kegiatan ini menghadirkan bapak oktarianto dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam sebagai narasumber utama. Beliau menyampaikan berbagai materi penting terkait pengembangan UMKM, seperti penguatan manajemen usaha, pemanfaatan potensi lokal, serta strategi meningkatkan daya saing produk dipasar. Wali Nagari Duo Koto, H. Jendrial, menegaskan pentingnya pelatihan seperti ini untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para pelaku UMKM dinagari dan para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

Dari wawancara dengan Bapak Hengki Sekretaris Nagari Duo Koto diketahui bahwa:

"produk kuliner yang dimikili Nagari Duo Koto masih berfokus pada olahan ikan endemik Danau Maninjau seperti peyek rinuak, dendeng rinuak, rendang rinuak, perkedel rinuak, palai bada, dan

sebagainya. Sedangkan untuk souvenir disiapkan dengan berbagai macam jenis misalnya topi, tas, baju, hingga perlak meja yang terbuat dari hasil olahan sampah."[31]

Hasil wawancara dengan Bapak Hengki mengungkapkan bahwa pengembangan produk wisata kuliner di Nagari Duo Koto masih sangat terfokus pada pemanfaatan sumber daya perikanan endemik Danau Maninjau. Produk-produk unggulan yang disebutkan antara lain olahan ikan lokal seperti serundeng rinuak, dendeng rinuak, rendang rinuak, perkedel rinuak, ampela ikan dan palai bada. Konsentrasi pada olahan rinuak menunjukkan adanya penguasaan teknik konservasi dan pengolahan ikan tradisional yang diwariskan secara berkelanjutan di komunitas tersebut. Variasi produk ini bukan hanya sekadar menampilkan satu jenis bahan baku, melainkan juga menunjukkan kreativitas dalam menyesuaikan cita rasa dan bentuk olahan sehingga dapat memenuhi selera wisatawan yang mencari pengalaman kuliner lokal khas Danau Maninjau.

Selain fokus pada kuliner, Bapak Hengki juga menjelaskan inisiatif pembuatan suvenir sebagai bagian dari upaya diversifikasi produk pariwisata. Suvenir yang disiapkan masyarakat Nagari Duo Koto mencakup berbagai macam barang, seperti topi, tas, baju, hingga perlak meja. Yang menarik, beberapa produk suvenir ini dibuat dari bahan hasil olahan sampah suatu langkah yang mencerminkan

[31] Wawancara dengan Perangkat Nagari di kantor Wali Nagari yaitu Bapak Hengki pada tanggal 23 April 2026

kesadaran lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari limbah. Pendekatan ini mengindikasikan adanya sinergi antara program pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, dan strategi pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Produk suvenir berbasis daur ulang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang peduli lingkungan sekaligus memperluas jenis barang dagangan yang ditawarkan di desa wisata.

Gambar 4.2

Pelatihan UMKM Nagari Duo Koto



Sumber: diskopukm.agam tahun 2026

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa upaya pengembangan pariwisata di Nagari Duo Koto mengandalkan kekuatan lokal bahan baku khas Danau Maninjau dan kearifan lokal dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai.

Pemerintah Nagari telah menunjukkan komitmen awal yang baik melalui pelatihan dan kolaborasi dengan dinas kabupaten, serta memanfaatkan potensi lokal. Namun, untuk memberdayakan

UMKM secara maksimal diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan akses pembiayaan, strategi pemasaran yang konkret, serta mekanisme evaluasi untuk memastikan hasil yang terukur dan berkelanjutan.

b) Promosi Wisata

Pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan peran strategis dalam mendorong Frekuensi kunjungan ke Linggai Park melalui dua pendekatan utama, alokasi anggaran pembangunan destinasi dan pemanfaatan kegiatan promosi berbasis komunitas. Dari sisi pembangunan, Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga (Disparpora) Kabupaten Agam mengajukan dana Rp7,5 miliar pada APBD 2019 untuk melanjutkan pembangunan Objek Wisata Linggai di Danau Maninjau. Tujuannya jelas meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut, dan pembangunan ini terbukti mendorong peningkatan kunjungan setiap tahunnya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mengangkat Linggai Park sebagai bagian dari strategi wisata halal. Pemerintah Kabupaten Agam menyiapkan objek wisata Linggai yang berada di Kecamatan Tanjung Raya sebagai salah satu destinasi wisata halal daerah, dengan harapan dapat memperkuat wisata halal dan mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Label wisata halal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi segmen wisatawan yang mencari destinasi sesuai nilai religius, sehingga berpotensi memperluas basis pengunjung.

Pendekatan promosi yang lebih langsung dan berbasis

komunitas terlihat dari penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti Festival Pesona Danau Maninjau (FesDaMa) 2022 yang mengadakan acara di Linggai Park. Festival ini melibatkan Dinas Parpora, Disdikbud Kabupaten Agam, dan Badan Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat, dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan ke provinsi Sumatera Barat, khususnya di daerah yang mengalami penurunan kunjungan selama pandemi. Dalam sambutannya, gubernur menyatakan bahwa even ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan sekaligus melestarikan budaya lokal.

Kegiatan literasi wisata untuk anak-anak TK yang diadakan di Linggai Park merupakan bentuk promosi berbasis edukasi yang memiliki dampak jangka panjang. Secara tidak langsung, literasi dapat mempromosikan suatu destinasi tertentu sehingga akan berdampak pada menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Kegiatan yang menawarkan suasana belajar menyenangkan di ruang terbuka dengan buku cerita, permainan edukatif, dan bahan bacaan bergambar membangun pengalaman positif bagi anak-anak dan keluarga yang datang, yang berpotensi mengubah mereka menjadi pengunjung berulang atau promotor alami destinasi tersebut.

Meskipun peran pemerintah dalam pengembangan dan promosi Linggai Park sudah terlihat konkret, pengaruhnya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan masih perlu didukung dengan strategi lebih komprehensif. Studi menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata yang menggabungkan literasi, budaya, dan digitalisasi

terbukti efektif meningkatkan daya tarik wisata. Sebagai contoh, pendirian Pojok Baca Wisata mampu menarik minat pengunjung, khususnya anak-anak dan pelajar, dengan peningkatan kunjungan hingga 60% pada dua minggu pertama. Ini menunjukkan bahwa kombinasi antara program literasi dengan promosi digital dan pengembangan budaya dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan.

Secara keseluruhan, pengaruh peran pemerintah dalam mempromosikan Linggai Park sudah cukup signifikan namun belum maksimal. Pemerintah telah berhasil membangun infrastruktur dasar, mengangkat citra wisata halal, dan menyelenggarakan festival besar yang meningkatkan kunjungan. Namun, untuk mencapai peningkatan kunjungan yang lebih berkelanjutan dan massif, diperlukan penambahan strategi promosi digital yang terintegrasi, pengembangan konten budaya yang lebih variatif, dan program loyalitas pengunjung. Dengan kombinasi ketiga elemen tersebut literasi, budaya, dan digitalisasi potensi Linggai Park sebagai destinasi wisata unggulan di Danau Maninjau dapat dioptimalkan secara maksimal.

c) Pemeliharaan Kawasan Wisata

Pemeliharaan kawasan wisata merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas dan daya tarik destinasi jangka panjang. Di Objek Wisata Linggai, Pemerintah Kabupaten Agam secara aktif menggelar kegiatan Bulan Bakti Dasawisma dan BBGRM (Bulan Bersih-Gotong Royong Masyarakat) yang

menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan kawasan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bentuk nyata dari komitmen kolektif antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun dan memelihara lingkungan wisata yang sehat, aman, dan nyaman bagi pengunjung.

Gambar 4.3

Kegiatan Bulan Bakti Dasawisma dan BBGRM



Sumber: Diskominfo Agam Tahun 2026

Peran pemerintah dalam hal ini lebih bersifat sebagai fasilitator yang memberikan ruang, arahan, dan dukungan logistik bagi masyarakat untuk terjun langsung dalam kegiatan gotong royong. Pemerintah Kabupaten Agam menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti alat kebersihan, tempat sampah sementara, serta manajemen teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pemerintah juga mengkoordinir jadwal, membagi zona pengerjaan, dan memastikan partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat, termasuk unsur Dasawisma dan Bangun Nagari. Dengan demikian,

pemerintah tidak mengambil peran dominan sebagai pelaksana tunggal, melainkan memfasilitasi agar masyarakat dapat berinisiatif dan bertanggung jawab atas kebersihan kawasan wisata mereka sendiri.

Kegiatan gotong royong yang difasilitasi pemerintah ini juga memperkuat peran masyarakat Bangun Nagari sebagai garda terdepan dalam pembangunan desa/nagari berbasis partisipatif. Melalui Bulan Bakti Dasawisma dan BBGRM, masyarakat dilatih untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap kawasan wisata Linggai, sehingga mereka tidak hanya menunggu instruksi dari pemerintah, tetapi secara proaktif menjaga dan memelihara lingkungan. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang positif, di mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan dan merasa bahwa kawasan wisata adalah bagian dari identitas dan aset bersama yang harus dijaga.

Sebagai bukti bahwa pemerintah masih berperan aktif dalam mengembangkan Objek Wisata Linggai Park, kegiatan Bulan Bakti Dasawisma dan BBGRM ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga pada aspek pemeliharaan dan pengelolaan partisipatif. Pemerintah terus hadir di lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, memberikan pembinaan, dan memotivasi masyarakat agar tetap konsisten dalam menjaga kebersihan kawasan. Kehadiran pemerintah dalam fasilitasi kegiatan gotong royong ini menjadi

indikator bahwa pengembangan wisata Linggai tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kunci keberhasilan destinasi wisata berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata Linggai Park mengedepankan prinsip kolaborasi dan keberlanjutan. Fasilitas yang disediakan pemerintah, arahan teknis yang diberikan, serta koordinasi yang dilakukan menjadi tulang punggung dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Hasilnya, kawasan wisata Linggai tetap terjaga dari waktu ke waktu, daya tarik pengunjung meningkat karena lingkungan yang bersih dan rapi, dan masyarakat nagari merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga aset wisata nagari. Models pemeliharaan berbasis gotong royong yang difasilitasi pemerintah ini dapat menjadi acuan bagi destinasi wisata lain dalam membangun sistem pengelolaan partisipatif yang efektif dan berkelanjutan.

3. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

a. **Kerja Sama Dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)**

Sebagai Dinamisator, pemerintah mengorganisir dan memotivasi masyarakat lokal, membentuk dan mendampingi kolompok sadar wisata (Pokdarwis), serta mendorong UMKM agar manfaat ekonomi merata di sekitar kawasan wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hengki, beliau mengatakan bahwa

pemerintah memberikan dukungan kepada pokdarwis agar ikut mendukung perkembangan wisata Linggai Park. Dari wawancara dengan Bapak Hengki diketahui bahwa:*"sekarang kita sedang membenahi satu persatu sejumlah destinasi wisata agar kunjungan wisatawan bisa kembali meningkat. Dan kami berharap pokdarwis Duo Koto ini betul-betul serius dalam menjalankan program kerjanya untuk mengembangkan sektor parawisata. Kami dari pemerintah negari akan siap membantu dan mendukung segala program yang akan dilakukan oleh pokdarwis."*[32] Dari hasil wawancara tersebut, pemerintah berupaya mengorganisir dan memotivasi masyarakat lokal melalui pembentukan serta pendampingan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan dorongan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar manfaat ekonomi tersebar merata di kawasan wisata. Hasil wawancara dengan Bapak Hengki, mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan dukungan konkret kepada Pokdarwis untuk mendukung pengembangan pariwisata di Linggai Park. saat ini pemerintah sedang melakukan pembenahan secara bertahap terhadap sejumlah destinasi wisata dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan. Selanjutnya, pemerintah berharap Pokdarwis Duo Koto menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan program kerja untuk mengembangkan sektor parawisata, dan

[32] Wawancara dengan Perangkat Nagari di kantor Wali Nagari yaitu Bapak Hengki pada tanggal 23 April 2026

menyatakan kesediaan instansi pemerintahan nagari untuk membantu serta mendukung seluruh program yang akan dijalankan oleh Pokdarwis tersebut.

b. **Pengadaan Event Diwisata Linggai Park**

Penyelenggaraan event berskala besar oleh pemerintah memiliki peran strategis dalam menarik kunjungan ke kawasan wisata Linggai Park, melalui kegiatan seperti Festival Pesona Danau Maninjau dan Lomba Gadih Marandang, pemerintah secara langsung meningkatkan visibilitas destinasi, menciptakan daya tarik temporer yang mendorong arus kunjungan, serta membangun citra kawasan sebagai pusat kegiatan budaya dan rekreasi. Event-event tersebut juga berfungsi sebagai media promosi yang efektif, memanfaatkan publikasi lokal dan regional untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

Berdasarkan wawancara dengan, Ibu Fatma pelaku usaha beliau menyampaikan:

"Pemerintah sering mengadakan event-event besar dilinggai park ini, seperti festival pesona danau maninjau dan lomba gadih marandang, sehingga ramai pengunjung yang datang kelinggai park."[33]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemerintah nagari telah berupaya menjalankan fungsi dinamisator dengan berperan aktif dalam menghidupkan kegiatan pariwisata melalui

[33] Wawancara dengan Pelaku usaha di Linggai Park yaitu Ibu Fatma pada tanggal 10 Mei 2026

penyelenggaraan event berskala besar dilinggai park. kegiatan seperti Festival Pesona Danau Maninjau dan Lomba Gadih Marandang rutin digelar oleh pemerintah sehingga menarik kunjungan masyarakat dalam jumlah besar ke kawasan tersebut. Melalui penyelenggaraan event-event ini, pemerintah tidak hanya meningkatkan daya tarik destinasi tetapi juga mendorong peningkatan mobilitas pengunjung, memperkuat promosi lokal, serta membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha setempat. Dengan demikian, kegiatan yang diinisiasi pemerintah berfungsi sebagai pemicu (trigger) aktivitas pariwisata yang sinergis antara penyelenggara, komunitas lokal, dan pengunjung, sehingga peran dinamisator pemerintah menjadi krusial dalam proses reaktivasi dan pengembangan pariwisata di Linggai Park.

Pemerintah Nagari telah berperan aktif dalam mengorganisir, memotivasi, dan menggerakkan masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata kawasan Linggai Park, peran ini diwujudkan melalui pembentukan dan pendampingan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), fasilitasi penyelenggaraan event berskala lokal dan regional (misalnya Festival Pesona Danau Maninjau dan Lomba Gadih Marandang) yang meningkatkan kunjungan, serta pemberian dukungan teknis dan kelembagaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar manfaat ekonomi tersebar merata. Pemerintah nagari juga melaksanakan pembenahan bertahap terhadap destinasi wisata untuk

meningkatkan daya tarik dan kenyamanan pengunjung, sekaligus mendorong komitmen Pokdarwis dalam melaksanakan program kerja, dengan demikian pemerintah nagari berfungsi sebagai penggerak utama yang memadukan kebijakan, sumber daya, dan koordinasi komunitas untuk merevitalisasi dan mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, Pemerintah Nagari telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengelolaan Wisata Linggai Park. Namun, peran tersebut belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya fasilitas pendukung wisata, belum optimalnya promosi wisata, serta masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan pengembangan wisata. Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan Linggai Park belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan dan merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah nagari, pengelola wisata, dan masyarakat agar potensi wisata Linggai Park dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa Pemerintah Nagari Duo Koto telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengelolaan Wisata Linggai Park. Peran tersebut terlihat dari pembentukan Pokdarwis, pengaturan tata kelola wisata, penyelenggaraan pelatihan UMKM, promosi wisata,

pemeliharaan kawasan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan dan festival yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Namun demikian, masih terdapat beberapa bentuk fasilitasi yang belum dapat diwujudkan secara optimal, salah satunya adalah pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata.

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa peran Pemerintah Nagari sebagai regulator dalam pengelolaan Wisata Linggai Park belum berjalan secara maksimal, meskipun berbagai fungsi regulasi telah dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari adanya pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengaturan tata kelola kawasan wisata, serta penetapan tarif retribusi masuk dan parkir sebagai dasar pengelolaan objek wisata. Ketiga kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi regulasi melalui penyusunan aturan dan pengawasan terhadap aktivitas pariwisata.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi regulator masih cenderung berada pada tahap dasar, yaitu sebatas membentuk kelembagaan, mengatur penataan kawasan, dan menetapkan tarif retribusi. Berdasarkan hasil wawancara, belum terlihat adanya regulasi yang lebih komprehensif, seperti penyusunan standar operasional pengelolaan wisata, mekanisme evaluasi kinerja Pokdarwis, pengaturan mengenai pembagian hasil pengelolaan wisata, maupun kebijakan yang secara khusus mengatur pengembangan usaha masyarakat di sekitar kawasan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih lebih berfokus pada aspek administratif

dibandingkan aspek pengembangan destinasi secara berkelanjutan.

Selain itu, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan retribusi, belum terdapat informasi mengenai transparansi pengelolaan hasil retribusi serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kualitas fasilitas wisata. Padahal, sesuai dengan teori Sondang P. Siagian, pemerintah sebagai regulator tidak ha nya berperan dalam menetapkan aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten melalui pengawasan, pembinaan, dan evaluasi sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator di Wisata Linggai Park sudah berjalan, tetapi belum optimal. Pemerintah telah melaksanakan fungsi dasar regulasi melalui pembentukan Pokdarwis, pengaturan tata kelola kawasan, dan penetapan retribusi. Akan tetapi, masih diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan aturan yang lebih komprehensif agar pengelolaan Wisata Linggai Park mampu mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Menurut analisis penulis, peran pemerintah sebagai fasilitator sebagian besar sudah terlaksana tetapi masih ada yang belum terlaksana yaitu bantuan modal usaha bukan disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Kondisi defisit anggaran

yang dialami pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menyebabkan adanya penyesuai an prioritas penggunaan anggaran. Dalam situasi tersebut, pemerintah lebih memfokuskan anggaran pada program-program yang dianggap mendesak, seperti pemeliharaan fasilitas umum, pelayanan dasar masyarakat, serta penyelesaian program pembangunan yang telah berjalan. Akibatnya, program bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM di kawasan Wisata Linggai Park belum dapat direalisasikan.

Apabila dikaitkan dengan teori Sondang P. Siagian, pemerintah sebagai fasilitator memiliki tugas menyediakan berbagai dukungan yang dapat memperlancar kegiatan masyarakat, baik berupa sarana, prasarana, pelatihan, pendampingan, maupun akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam penelitian ini, pemerintah telah melaksanakan sebagian fungsi fasilitator melalui pelatihan UMKM, promosi wisata, dan penyediaan fasilitas pendukung. Akan tetapi, aspek fasilitasi berupa bantuan modal usaha belum terlaksana karena adanya keterbatasan anggaran. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa peran fasilitator pemerintah belum sepenuhnya optimal, bukan karena lemahnya komitmen pemerintah, tetapi karena adanya keterbatasan kapasitas fiskal yang memengaruhi pelaksanaan program.

Penulis juga berpendapat bahwa bantuan modal usaha merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Modal usaha dapat digunakan untuk mengembangkan usaha kuliner, kerajinan, penyewaan peralatan wisata, homestay, maupun usaha lainnya yang mendukung aktivitas pariwisata. Tanpa adanya dukungan permodalan,

sebagian pelaku usaha mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas usaha, maupun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan. Dampaknya, manfaat ekonomi dari keberadaan Wisata Linggai Park belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, menurut analisis penulis, pemerintah perlu mencari alternatif pendanaan di luar APBD, seperti membangun kerja sama dengan pemerintah provinsi, kementerian terkait, program CSR perusahaan, lembaga perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya yang memiliki program pemberdayaan UMKM. Dengan adanya sinergi tersebut, bantuan permodalan tetap dapat diberikan meskipun kondisi anggaran pemerintah sedang mengalami keterbatasan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha di kawasan Wisata Linggai Park.

3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wisata Linggai Park, diketahui bahwa Pemerintah Nagari Duo Koto telah menjalankan perannya sebagai dinamisator dengan cukup baik dalam menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan sektor pariwisata. Peran dinamisator diwujudkan melalui upaya mengorganisir masyarakat, membangun kerja sama antar pemangku kepentingan, memotivasi kelompok masyarakat, serta menciptakan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar.

Peran tersebut terlihat dari kerja sama dan pendampingan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata Linggai Park. Pemerintah Nagari tidak hanya membentuk Pokdarwis, tetapi juga memberikan dukungan, arahan, serta motivasi agar kelompok tersebut mampu menjalankan program kerja secara optimal. Dukungan pemerintah ini menunjukkan adanya komitmen untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengembangan destinasi wisata sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan pariwisata. Melalui Pokdarwis, masyarakat didorong untuk menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan daya tarik wisata Linggai Park.

Selain melalui Pokdarwis, peran pemerintah sebagai dinamisator juga terlihat dari penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan wisata yang mampu menghidupkan aktivitas pariwisata di kawasan Linggai Park. Kegiatan seperti Festival Pesona Danau Maninjau dan Lomba Gadih Marandang menjadi sarana untuk menarik wisatawan sekaligus mempromosikan potensi wisata dan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Event-event tersebut berhasil menciptakan keramaian dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi pedagang, pelaku UMKM, penyedia jasa wisata, dan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pariwisata.

Peran dinamisator pemerintah juga terlihat dari upaya pembenahan dan pengembangan destinasi wisata secara bertahap. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas kawasan wisata agar tetap menarik dan mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berusaha membangun semangat dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan potensi wisata yang dimiliki nagari.

Secara keseluruhan, peran Pemerintah Nagari sebagai dinamisator telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan Wisata Linggai Park dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah berhasil menjadi penggerak yang mampu menyatukan masyarakat, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan berbagai pihak terkait dalam satu tujuan bersama, yaitu mengembangkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, peran tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas Pokdarwis, penyelenggaraan event yang lebih beragam dan berkelanjutan, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Nagari Duo Koto.

4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wisata Linggai Park

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Wisata Linggai Park telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai usaha ekonomi masyarakat seperti UMKM, rumah makan, warung, penyewaan perahu, souvenir, serta

usaha kuliner khas Danau Maninjau. Keberadaan wisatawan menciptakan peluang pasar yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperoleh tambahan pendapatan. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan masyarakat belum berlangsung secara optimal dan merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya fasilitas wisata, bantuan modal usaha, promosi yang belum maksimal, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah nagari, Pokdarwis, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata Linggai Park.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengelolaan Wisata Linggai Park. Ketiga peran tersebut telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan destinasi wisata dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan masyarakat secara maksimal, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan fasilitas, perluasan promosi wisata, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Linggai Park, peran pemerintah nagari sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata lokal dan pendapatan masyarakat. Mengenai peran Pemerintah Nagari dalam pengelolaan Wisata Linggai Park untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Nagari sebagai Regulator dalam pengelolaan Wisata Linggai Park telah dilaksanakan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengaturan tata kelola kawasan wisata, serta penerapan kebijakan retribusi tiket masuk dan parkir. Peran tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan pengelolaan wisata yang tertib, terarah, dan berkelanjutan. Namun demikian, regulasi yang ada masih perlu diperkuat melalui penyusunan kebijakan yang lebih rinci terkait pengembangan usaha masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta sistem pengawasan yang lebih efektif.

2. Peran Pemerintah Nagari sebagai Fasilitator telah diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan UMKM, promosi wisata, serta fasilitasi pemeliharaan kawasan wisata. Berbagai program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan usaha, memperluas peluang ekonomi, serta menjaga keberlanjutan destinasi

wisata. Akan tetapi, dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas pendukung, akses pemasaran, dan bantuan permodalan masih belum sepenuhnya merata sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat belum optimal.

3. Peran Pemerintah Nagari sebagai Dinamisator telah terlaksana melalui pembentukan dan pendampingan Pokdarwis, penyelenggaraan berbagai event wisata, serta upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Kegiatan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata masih perlu ditingkatkan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

Pengelolaan Wisata Linggai Park telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui berkembangnya berbagai usaha ekonomi seperti kuliner, perdagangan, homestay, jasa wisata, dan usaha oleh-oleh. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan masyarakat belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas wisata, promosi yang belum maksimal, akses modal usaha yang belum merata, serta rendahnya keterlibatan sebagian masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, Pokdarwis, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata Linggai Park secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Nagari Duo Koto, diharapkan dapat memperkuat regulasi dan kebijakan pengelolaan wisata yang lebih terarah, khususnya terkait pengembangan usaha masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan sistem pengawasan kawasan wisata agar pengelolaan Wisata Linggai Park dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah perlu memperluas program bantuan modal usaha dan memastikan pendistribusiannya dilakukan secara adil, merata, dan tepat sasaran kepada pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata. Bantuan modal yang merata akan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sehingga manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Pemerintah perlu meningkatkan program pendampingan UMKM secara berkelanjutan, tidak hanya melalui pelatihan, tetapi juga melalui akses permodalan, pemasaran digital, pengemasan produk, dan perluasan jaringan pemasaran agar produk lokal memiliki daya saing yang lebih tinggi.
4. Pokdarwis dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan pengelolaan kawasan wisata, serta terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan wisata yang menarik bagi pengunjung.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang

lebih mendalam mengenai dampak ekonomi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat atau efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat.

Dengan adanya peningkatan kerja sama antara pemerintah, Pihak terkait, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan Wisata Linggai Park dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Nagari Duo Koto.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. (2025). *Kecamatan Tanjung Raya dalam Angka 2025* (Lubuk Basung: BPS).

Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*, (San Francisco: Jossey-Bass).

Cooper, C. et al. (2008). *Tourism: Principles and Practice*, (Harlow: Pearson Education).

Cooper C, John Fletcher, David Gilbert, Rebecca Shepherd. (1993). *Tourism: Principles and Practice* (London: Pitman Publishing).

Dallen J. T, Stephen W. B. (2003). *Heritage Tourism* (London: Pearson Education).

Dinas Pariwisata Kabupaten Agam. (2023). *Laporan Data Kunjungan Wisata dan Pendapatan Masyarakat Tahun 2023*.

Dinas Pariwisata Kabupaten Agam. (2023). *Rencana Kerja Tahun 2023*.

Dinas Pariwisata Kabupaten Agam. (2024). *Profil Destinasi Wisata Kabupaten Agam* (Agam).

Elisabeth Caroline Pawan. (2013). *Pengakuan Pengukuran, Pengungkapan Dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 2 Pada PT Pegadaian (Persero).* Jurnal EMBA.

I Pitana Gede dan I Diarta Surya Ketut. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi).

Iqbal Hasan M. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Navis, A.A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti).

Nasir Rulloh. (2017). *Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung)

Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kinerja Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Khairul, Sefriameli. (2023). *Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan

Akuntansi (JEMSI).

Kurnia Maulidi Noviantoro. (2020). *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0*, jurnal penelitian.

Oka A. Yoeti. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa).

Oka A. Yoeti. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramita).

Pemerintah Kabupaten Agam. (2020). *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Agam 2020–2025*.

Pemerintah Kabupaten Agam. (2024). *Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Agam* (Agam).

Pemerintah Kabupaten Agam. (2023). *RIPPARDA Kabupaten Agam* (Agam).

Pitana I, Diarta P. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset).

Sarbah A, Doris Out-Nyarko. (2014*). An Overview of The Design School of Strategic Managament (strategy formulation as a process of conception).* Open Journal of Business and Management, Vol.2 No.3, Hal 232.

Setiyono Budi, Ashari Rachmat. (2022). *Evaluasi RIPPDA dalam Pengembangan Pariwisata Daerah*, Journal of Politic and Government Studies.

Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Susi Iswanti dan Zulkarnaini. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir*. jurnal ilmu administrasi public.

Sutisna. (2019). *Manajemen Pariwisata Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Sukirno, S. (2010). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana).

Suparmoko. (1997). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Yogyakarta: BPFE).

UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*, (New York: UNDP).

Wawancara dengan Bapak Jendrial selaku Wali Nagari Duo Koto di Kantor Nagari Duo Koto, tanggal 23 April 2026 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Miswar di Wisata Linggai Park, tanggal 25 April 2026 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hengki di kantor Wali Nagari, tanggal 23 April 2026 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fatma di Wisata Linggai Park, tanggal 10 Mei 2026 pukul 14.30 WIB.

Yoeti, Oka A. (2006). *Manajemen Pariwisata*, (Bandung: Angkasa).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 355.16/Un.26.3/HK.00.5/10/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN TRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Siti Chairani Alsyifah** NIM**. 3222131** tanggal 01 Oktober 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Peran Pemerintah Dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus: Destinasi Wisata Linggai Park, Kecamatan Tanjung Raya)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Cahya Agung Mulyana, ST. M.PPar**
NIP	:	198708012019031005
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata Muda Tk.I/III/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Pariwisata
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Pariwisata
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 01 Oktober 2025
Dekan,

NIDA ALPIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0768/Un.26.3/PP.07/04/2026 14 April 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Duo Koto Kec. Tanjung Raya
Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

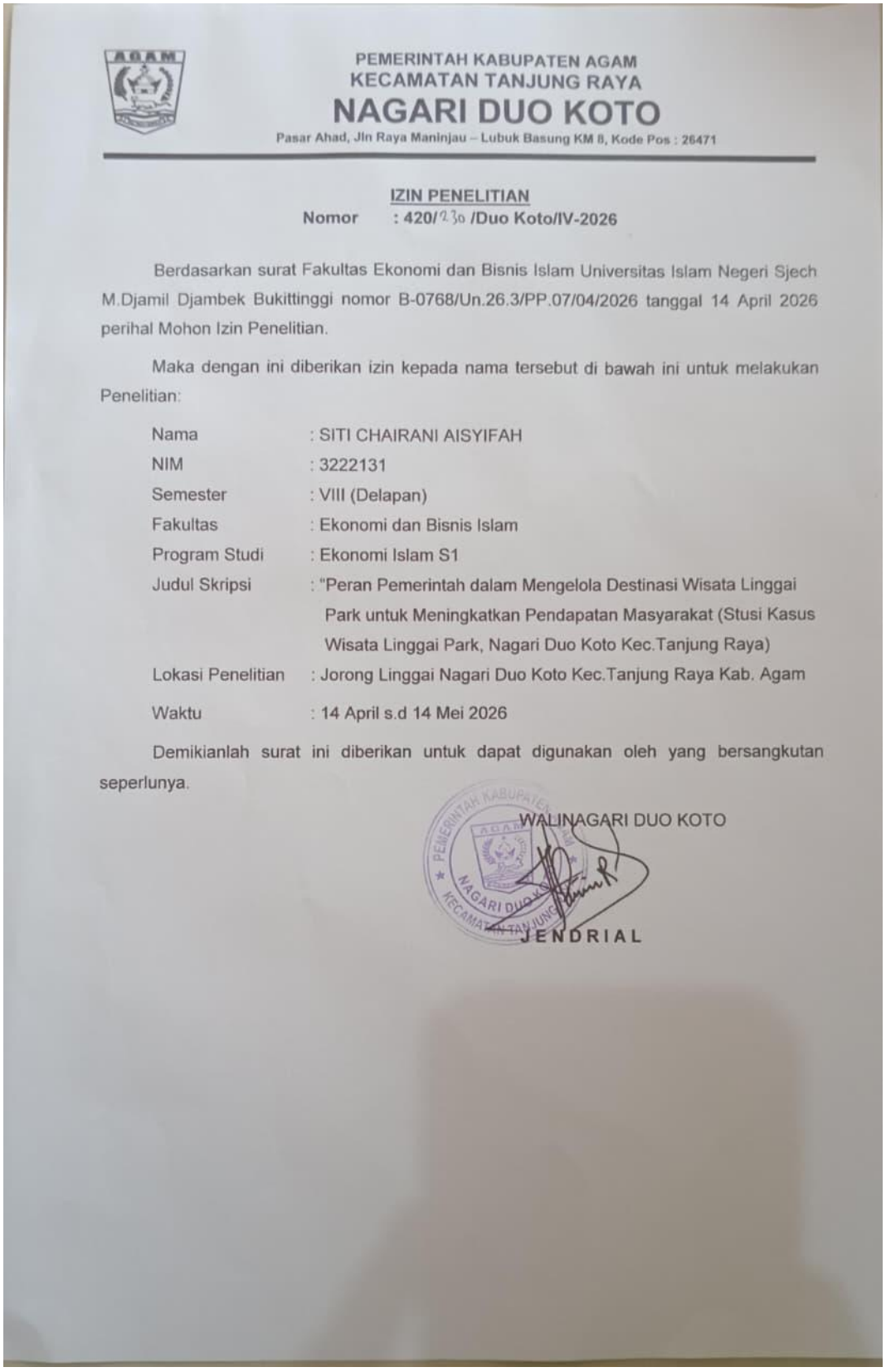
Nama	: **Siti Chairani Alsyifah**
NIM	: 3222131
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Peran Pemerintah dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Wisata Linggai Park, Kec. Tanjung Raya)"***
Lokasi Penelitian	: Jorong Linggai Nagari Duo Koto Kec. Tanjung Raya Kab. Agam
Waktu	: 14 April s.d 14 Mei 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3 Surat Balasan izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA
NAGARI DUO KOTO
Pasar Ahad, Jln Raya Maninjau – Lubuk Basung KM 8, Kode Pos : 26471

IZIN PENELITIAN
Nomor : 420/230 /Duo Koto/IV-2026

Berdasarkan surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi nomor B-0768/Un.26.3/PP.07/04/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Mohon Izin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan izin kepada nama tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian:

Nama	: SITI CHAIRANI AISYIFAH
NIM	: 3222131
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: "Peran Pemerintah dalam Mengelola Destinasi Wisata Linggai Park untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Stusi Kasus Wisata Linggai Park, Nagari Duo Koto Kec.Tanjung Raya)
Lokasi Penelitian	: Jorong Linggai Nagari Duo Koto Kec.Tanjung Raya Kab. Agam
Waktu	: 14 April s.d 14 Mei 2026

Demikianlah surat ini diberikan untuk dapat digunakan oleh yang bersangkutan seperlunya.

WALINAGARI DUO KOTO

JENDRIAL

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara kualitatif, yang menfokuskan pertanyaan mendalam atau terbuka, dan kompleksitas. Sehingga dapat diketahui sudut pandang dan pendapat informan dalam menanggapi berbagai pertanyaan secara lebih luas.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penelitian tugas akhir (skripsi) pada program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, saya :

Nama : Siti Chairani Alsyifah

Nim : 3222131

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing : Cahya Agung Mulyana, ST.M.PPar

Bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul "Peran pemerintah nagari dalam mengelola destinasi wisata linggai park untuk meningkatkan pendapatan masyarakat studi kasus wisata linggai park nagari duo koto".

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya untuk menjawab wawancara penelitian ini.

Pertanyaan Kepada Pemerintah Nagari, pengelola dan pelaku usaha.

Gambaran umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya Wisata Linggai Park?
2. Apa tujuan pemerintah mengembangkan Linggai Park?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan wisata?

Peran Pemerintah sebagai Regulator

4. Apa saja aturan atau kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah nagari dalam mengelola wisata linggai park?
5. Bagaimana peran pemerintah nagari dalam memastikan peraturan atau kebijakan berjalan dengan baik?

6. Apakah pemerintah nagari memiliki program khusus bagi pengembangan kawasan wisata linggai park?
7. Bagaimana pemerintah membentuk Pokdarwis?
8. Bagaimana pembagian tugas antara pemerintah dan pengelola wisata linggai park?
9. Bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wisata?
10. Apakah terdapat aturan mengenai kebersihan, keamanan, parkir, dan pedagang?
11. Bagaimana pengelolaan retribusi wisata linggai park?
12. Apa kendala pemerintah dalam menerapkan aturan tersebut?

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

13. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh pemerintah nagari untuk mendukung aktivitas usaha dikawasan wisata Linggai Park?
14. Bagaimana pemerintah nagari memberikan pembinaan atau pelatihan kepada para pelaku usaha?
15. Apakah pemerintah nagari memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha?
16. Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah kepada pengelola wisata?
17. Apakah pemerintah membangun fasilitas umum?
18. Bagaimana pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana diwisata linggai park?
19. Apakah pemerintah membantu mempromosikan wisata linggai park?
20. Apakah pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat atau UMKM?
21. Apakah pemerintah membantu akses permodalan bagi pelaku usaha?
22. Seberapa besar dukungan pemerintah terhadap pengembangan wisata linggai park?

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

23. Apakah pemerintah nagari bekerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan wisata linggai park?

24. Bagaimana upaya pemerintah nagari dalam memperbaiki atau menjaga kawasan wisata agar ramai pengunjung?
25. Bagaimana pemerintah mengajak masyarakat ikut mengembangkan wisata linggai park?
26. Apa saja bentuk pembinaan kepada Pokdarwis?
27. Apakah pemerintah pernah mengadakan sosialisasi secara rutin?
28. Bagaimana pemerintah memotivasi masyarakat agar membuka usaha?
29. Apakah pemerintah berkerja sama dengan pihak swasta atau instansi lainnya?
30. Bagaimana pemerintah menyelesaikan konflik dalam pengelolaan wisata linggai park?
31. Apa upaya pemerintah agar masyarakat tetap aktif mengembangkan wisata linggai park?

Dampak Ekonomi

32. Apakah keberadaan wisata Linggai Park meningkatkan pendapatan masyarakat?
33. Usaha apa saja yang tumbuh dan berkembang setelah adanya wisata linggai park ini?
34. Berapa perkiraan peningkatan pendapatan masyarakat?
35. Apakah lapangan pekerjaan bertambah?
36. Apa saja kendala yang masih dihadapi masyarakat?

Penutup

37. Apa harapan pemerintah terhadap pengembangan Linggai Park ke depan?
38. Apa saran pemerintah agar wisata semakin berkembang?

Lampiran 5 Dokumentasi

Dokumentasi dengan Sekretaris Nagari Duo Koto



Dokumentasi dengan pelaku usaha





Dokumentasi dengan pengunjung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Siti Chairani Alsyifah
Nim	: 3222131
Tempat/tanggal lahir	: Cicawan, 26 Juni 2002
Jurusan	: Ekonomi Islam
Fakultas	: FEBI
Alamat	: Jorong Cicawan Nagari Paninjauan
Email	: sitichairani024@gmail.com
No. Hp	: 081993390378
Riwayat Pendidikan	:
	SDN 35 Paninjauan
	SMP N 2 Tanjung Raya
	SMK N 1 Tanjung Raya
	UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Nama Orang Tua	:
Ayah	: Ade Iman Chairman
Ibu	: Merry Erismi
Anak ke	: 2 dari 4 Bersaudara
Motto	: Proses Tidak Menghianati Hasil
Judul skripsi	: PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MENGELOLA DESTINASI WISATA LINGGAI PARK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI KASUS WISATA LINGGAI PART DUO KOTO)